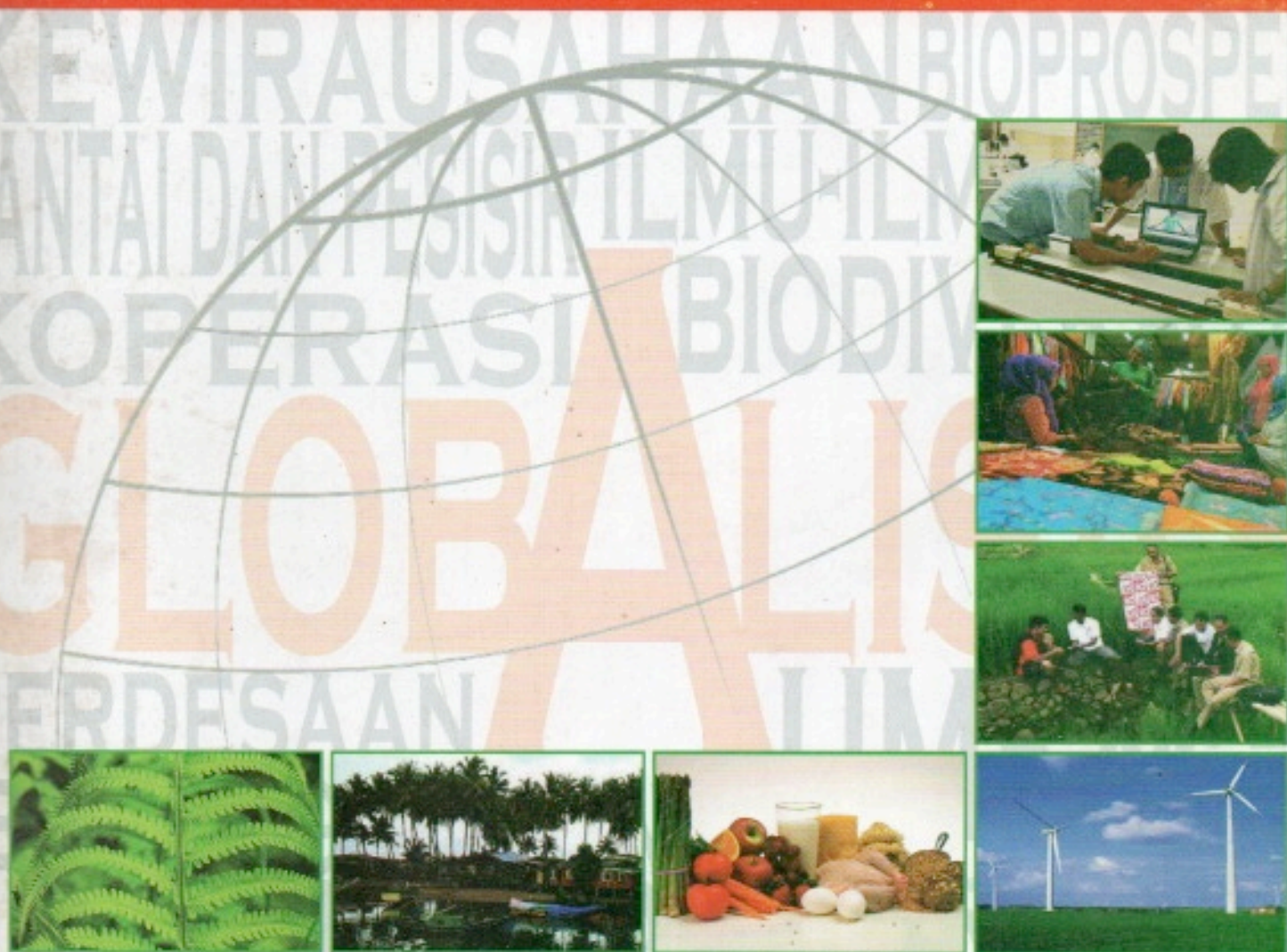


**PANDUAN &
KUMPULAN ABSTRAK
SEMINAR NASIONAL**

**Pengembangan Sumberdaya Perdesaan
dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI**



Auditorium Graha Widyatama
Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R Boenyamin Purwokerto

24-25 November 2016



L P P M UNSOED
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA
(PERHEPI)



**PANDUAN DAN
KUMPULAN ABSTRAK**

SEMINAR NASIONAL

**Pengembangan Sumberdaya Perdesaan
dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI**



**Auditorium Graha Widyatama
Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R Boenyamin Purwokerto
24 - 25 November 2016**

Kerjasama
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
dengan
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Komda Purwokerto

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas ijin-Nya penyusunan buku panduan seminar dan kumpulan abstrak ini dapat diselesaikan. Buku ini berisi panduan seminar dan kumpulan abstrak para peneliti pada kegiatan seminar nasional dan *call for papers* dengan tema "Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI" yang terbagi dalam tujuh kelompok bidang yaitu:

1. Biodiversitas tropis dan bioprospeksi
2. Pengelolaan wilayah kelutan, pesisir dan pedalaman
3. Pangan, gizi dan kesehatan
4. Energi baru dan terbarukan
5. Kewirausahaan, koperasi dan UMKM
6. Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan
7. Ilmu- Ilmu Murni (Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi)

Ketujuh bidang ini akan diselenggarakan dalam 7 ruang (*parallel session*) di Gedung Graha Widyatama UNSOED. Tiap ruang dipandu oleh moderator dan dibantu oleh satu orang notulis.

Seminar nasional dan *call for papers* ini akan menghadirkan *keynote speakers* yang akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI yaitu, Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si, Dr. Ir. Endah Murningtyas M.Sc, dan Wayan Supadno. Makalah yang dipresentasikan dalam seminar kali ini berasal dari hasil penelitian para dosen dan peneliti dari Universitas Jenderal Soedirman, 31 Universitas di Indonesia 1 Instansi Pemerintah, yaitu UNPAD, UNY, UNILA, UNSIL Tasikmalaya, Universitas Trilogi Jakarta, STIKOM, Universitas Tadulako, Akademi Farmasi Theresiana Semarang, Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta, STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, STIKES Payung Negeri Pekanbaru, STIE Ekuitas Bank Jabar Bandung, dan Universitas Lain. Lembaga penelitian yang terlibat dalam seminar ini yaitu LIPI.

Buku panduan seminar dan kumpulan abstrak tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini akan memudahkan peserta dalam mengikuti seminar dan juga memberikan informasi terkait dengan hasil-hasil penelitian yang ada di dalamnya.

Selamat berseminar

Purwokerto, 24-25 November 2016

Panitia

SUSUNAN EDITOR

Editor/ Mitra Bestari

1. Prof. Hadi Wiyono (UNS)
2. Dr. Dra. Chriswardani Suryawati, M. Kes (UNDIP)
3. Subejo, S.P., M.Sc., Ph.D (UGM)
4. Dr. Uun Yanuar (UNIBRAW)
5. Dr. Untung Susanto (BALIT BP Padi)
6. Dr. Solatun Dulah Sayuti (Universitas Bina Nusantara)
7. Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, M.S. (IPB)

PENYELARAS TIAP BIDANG

Bidang 1. Biodiversitas Tropis dan Bioprospeksi

1. Dr. Agus Nuryanto, M. Sc.
2. Dr. Nurtjahjo Dwi S.PgDip.AgrSc., M.App.Sc.
3. Dr. Fatichin, S.P., M.P.
4. Hanif Nasiatul Baroroh, S.Farm., Apt., M.Sc.
5. Dr. Ir. Ponendi Hidayat, M.P.

Bidang 2. Pengelolaan Wilayah Kelautan, Pesisir, dan Pedalaman

1. Dr. Endang Hilmi, S.Hut., M.Si.
2. Anandita Eka Santi, S.Pt., M.Si.
3. Dr. Yusmi Nur Wachidati, M.Si.

Bidang 3. Pangan, Gizi, dan Kesehatan

1. Prof. Dr. Rifda Naufalin, S.P., M.Si.
2. Condro Wibowo, S.TP., M.Sc., Ph.D.
3. Friska Citra Agustia, M.Sc.
4. Agnes Fitria Widiyanto, SKM., M.Sc.
5. Dr. Rumpoko Wicaksono, S.P., M.P.
6. Dr. Siwi Pramatama Mars W., S.Si., M.Kes.

Bidang 4. Energi Baru dan Terbarukan

1. Dr. Mukhtar Effendi, S.Si., M.Eng.
2. Dr. Eng Suroso, S.T., M.Eng.
3. Uyi Sulaiman, S.Si., M.Si., Ph.D.
4. Ropiudin, S.TP., M.Si.

Bidang 5. Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM

1. Prof. Dr. Suliyanto, S.E., M.Si.
2. Drs. Sudarto, ME., CSRS.
3. Dr. Muhammad Sulthan, M.Si.
4. Alpha Nadeira M., S.P., M.Sc.
5. Indah Widyarini, S.P., M.P.

MBS DAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR¹

Muslih Faozanudin, H. Bahtaruddin, Mahmud Setiahad, M.Si².

muslihfhz@gmail.com; bahtaruddinmuhtar@yahoo.com; msetiahad@yahoo.com

ABSTRAK

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan model tata kelola yang memberikan kewenangan besar kepada manajemen sekolah untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan. Model ini yang telah menjadi kebijakan umum dalam sistem pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan implementasi MBS dipengaruhi oleh seberapa luas pemahaman para kepala sekolah sebagai manajer terhadap program tersebut. Tanpa ada pemahaman yang memadai tentang program, maka program akan sulit dapat tercapai. Suatu kebijakan dan program dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila terdapat pemahaman yang baik dari para manajer dan pelaksana di tingkat operasional. Dengan demikian, kapasitas para pelaksana ikut menentukan terhadap kualitas MBS.

Kata Kunci: Tata Kelola, Manajemen Berbasis Sekolah, Komite sekolah

ABSTRACT

School-based management (SBM) is a governance model that gives great authority to the management of the school to perform the duties and responsibilities in the administration and servicing Javanese pndidikan in the educational unit. This model that has become a common policy in the management systems of education at primary and secondary levels of education. The results of the research showed that, the successful implementation of MBS affected by how comprehensive understanding of the principal as the manager of the program. Without understanding about the program, the program will be difficult to be achieved. A policy and programs can be implemented in accordance with what is expected, if there is a good understanding of managers at an operational level. Thus, the capacity of the manager could determine the quality of the MBS.

Key words: governance, school-based management, School Commitee

PENDAHULUAN

¹ Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 'Pengembangan Sumber Daya local Berkelanjutan VI, 24-25 Nopember 2016. LPPM Unsoed Purwokerto

² Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara, FISIP Unsoed Purwokerto.

Kebijakan tentang tata kelola pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah ditetapkan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang diperbaharui dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang ‘Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan’. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi”

Dari ketentuan diatas juga tersirat bahwa, sistem pengelolaan satuan pendidikan baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, tidak ada perbedaan dalam model manajemen antara pendidikan yang diselenggarakan dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan yang diselenggarakan dibawah kewenangan Kementerian Agama berupa Sekolah agama (Madrasah), yaitu dengan model manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS adalah suatu sistem pengelolaan yang memberikan otonomi kepada sekolah dalam kerangka menjalankan kebijakan pendidikan nasional. MBS merupakan model manajemen sekolah yang memberikan keleluasaan sekolah untuk mengatur dan mengelola sistem administrasi dan pembelajaran. Secara lebih luas MBS dapat diartikan sebagai model manajemen satuan pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara mandiri dan partisipatif. Mandiri dimaknai bahwa, satuan pendidikan memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yaitu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan partisipatif, dimaknai bahwa, satuan pendidikan dalam membuat keputusan dan kebijakan tidak diputuskan sendiri oleh pimpinan sekolah, melainkan melalui proses partisipatif dari semua komponen dalam satuan pendidikan, yang meliputi, kepala sekolah, guru, wali murid, dan komite sekolah. Apabila memungkinkan maka diberikan ruang yang luas kepada stakeholder lain (Rado, 2010:56) Tujuan utama dari MBS adalah mengembangkan prosedur kebijakan

sekolah, memecahkan masalah-masalah umum, memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, dalam rangka menghasilkan peserta pembelajar /peserta didik yang diharapkan oleh masyarakat.

Manajemen Berbasis sekolah yang menjadi model tata kelola pada satuan pendidikan yang saat ini diterapkan, sebenarnya merupakan turunan dari sistem manajemen public, yang secara praktis mulai diterapkan sejak era reformasi. Dengan demikian, MBS sebagai model manajemen pendidikan belum lama diterapkan. Basis pemikiran dari manajemen publik salah satunya adalah adanya desentralisasi terhadap urusan-urusan, terutama pada sifat urusan yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat (Hughes, 1997: 34).

Secara lebih luas MBS dapat diartikan sebagai model manajemen satuan pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara mandiri dan partisipatif. Mandiri dimaknai bahwa, satuan pendidikan memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yaitu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan partisipatif, dimaknai bahwa, satuan pendidikan dalam membuat keputusan dan kebijakan tidak diputuskan sendiri oleh pimpinan sekolah, melainkan melalui proses partisipatif dari semua komponen dalam satuan pendidikan, yang meliputi, kepala sekolah, guru, wali murid, dan komite sekolah. Apabila memungkinkan maka diberikan ruang yang luas kepada stakeholder lain (Rado, 2010:56) Tujuan utama dari MBS adalah mengembangkan prosedur kebijakan sekolah, memecahkan masalah-masalah umum, memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, dalam rangka menghasilkan peserta pembelajar /peserta didik yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan MBS, sekolah memiliki kewenangan dan otonomi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, walaupun ada unsur lain dalam struktur MBS yang ikut mengendalikan penyelenggaraan sekolah, yang kemudian menjadi lembaga non-struktural, yang disebut komite sekolah, yang anggotanya terdiri dari

guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan anggota masyarakat (Nurkholis, 2003:2) Untuk menjamin tata kelola yang baik, maka penerapan MBS didasarkan pada prinsip *governance*, yang secara eksplisit tercantum dalam pasal 49 ayat 2 PP No 66 tahun 2012. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: Nirlaba, Akuntabilitas, Penjaminan mutu, Transparansi, Akses berkeadilan,.

Selanjutnya, untuk ikut menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip di atas, peran lembaga lain di luar sekolah sangat diperlukan, yaitu dewan sekolah yang saat ini dikenal dengan Komite sekolah. Lembaga merupakan cerminan dari partisipasi masyarakat untuk membangun pendidikan yang bermutu dan mandiri merupakan bentuk dari otonomi pendidikan (Zainuddin, 2008:46). Komite sekolah memiliki tiga peran, yaitu peran konsultasi (*consultative board*); peran pengawasan (*control board*), dan sebagai pengarah (*steering comitte*). Peran tersebut sangat strategis untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabilitas dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan (Soewartoyo, 2003:66; Zainuddin, 2008:47).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan mengambil 2 Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Purwokerto Timur dan Kecamatan Cilongok, Sebagai situs utama adalah SD Negeri Pagaraji 1 Kecamatan cilongok, dan SD Negeri 3 Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif, dan yang lebih menekankan pada konteks, latar penelitian dan referensi yang bersifat subjektif (Marshal and Rosman, 1989:46). Desain analisis penelitian menggunakan model interaktif (Miles & Huberman (1992:18), yang terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan MBS sebagai model tata kelola satuan pendidikan tidak lepas dari kondisi-kondisi yang mempengaruhi. Kondisi tersebut berasal dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kapasitas kepala sekolah sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan MBS, dari sisi eksternal, adalah dipengaruhi oleh peran komite sekolah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian sekolah dalam MBS.

1. Kapasitas Kepala Sekolah Dalam Memahami Program MBS

Keberhasilan implementasi MBS dipengaruhi oleh seberapa luas pemahaman para kepala sekolah sebagai manajer terhadap program tersebut. Tanpa ada pemahaman yang memadai tentang program, maka program akan sulit dapat tercapai. Suatu kebijakan dan program dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila terdapat pemahaman yang baik dari para manajer dan pelaksanaan di tingkat operasional. Sebaliknya, ketidak pemahaman para manajer tingkat operational dapat berakibat gagalnya mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kepala sekolah memiliki kewenangan tertinggi dalam pengendalian kegiatan di sekolah, sehingga ia yang bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pencapaian program sekolah. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan yang memadai terutama terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Kemampuan tersebut salah satunya adalah memahami terhadap apa yang akan dikerjakan terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil penelitian terkait dengan pemahaman Kepala Sekolah terhadap pelaksanaan MBS pada Satuan pendidikan SD, diketahui bahwa terdapat pemahaman yang masih beragam, dan cenderung pemahaman tersebut belum tuntas. Maksudnya adalah ada sebagian Kepala sekolah yang belum tahu secara luas tentang bagaimana MBS ini diterapkan. Sebagian diantara para kepala sekolah menjalankan tugasnya lebih mendasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh para pendahunya. Padahal sistem MBS sebagai bentuk dari desentralisasi satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan, sangat memerlukan pemahaman yang utuh dari para pelaksana di bawah, yaitu kepala Sekolah. Tanpa pemahaman yang benar dan utuh tentang MBS, maka

tatakelola sekolah sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari hasil wawancara terdapat beberapa macam pemahaman terhadap makna MBS. *Pertama*, MBS diidentikkan dengan pelaksanaan kurikulum, khususnya yang dikaitkan dengan metode pembelajaran. MBS dikaitkan dengan pelaksanaan system belajar CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, belajar yang berpusat pada siswa (*student centered learning-SCL*). *Kedua*, MBS ditafsirkan sebagai kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait dengan pendanaan pendidikan, sehingga dengan MBS justru semakin berkurangnya peran serta masyarakat pendidikan. Dalam pemahaman ini, MBS adalah menyelenggarakan pelayanan pendidikan dengan kekuatan sendiri, yaitu mendasarkan pada dana BOS yang diterima oleh sekolah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan di bawah ini. *Ketiga*. MBS dimaknai sebagai tata kelola sekolah, yaitu keterlibatan masyarakat dalam ikut serta dalam tata kelola pendidikan. Pernyataan salah satu informan terkait hal tersebut adalah: “Pelaksanaannya kan harus melibatkan masyarakat yang terkait *nggih*, ini sih dari pihak desa membantu, masyarakat juga membantu ya cuma kurang maksimal *lah*”. (Krkmr-1)

Dari ketiga pemahaman tersebut MBS juga dipahami sebagai pengembangan program kemitraan dengan pihak eksternal, khususnya dengan wali murid. Dengan pemahaman ini maka MBS adalah ‘bagaimana sekolah seharusnya menjalin yang lebih baik dengan masyarakat, khususnya wali murid dalam rangka untuk mensukseskan program-program sekolah’. Fokus dari MBS adalah pada manajemen eksternal, mengelola pola hubungan dengan pihak-eksternal.

Pemahaman yang kurang komprehensif dari kepala sekolah terhadap makna MBS, menyebabkan pelaksanaan dilapangan juga kurang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu terlaksananya tata kelola sekolah sesuai dengan maksud dari MBS yang sebenarnya. Kurang pahaman kepala sekolah terhadap MBS ini juga terjadi di banyak sekolah. Hasil penelitian dari Haryanto, (2014:185) menyatakan bahwa “... banyak kepala Sekolah sebagai manajer sekolah yang kurang memahami secara detail tentang MBS dan implementasinya..”

Secara umum, memang juga karena masih lemahnya dalam sosialisasi terkait dengan MBS baik secara konseptual dan implementasinya, banyak kepala sekolah

yang kurang paham terhadap MBS. Padahal dalam MBS terdapat hak otonomi sekolah yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan. Hanya saja seberapa luas hak otonomi yang dimiliki oleh sekolah tidak terlepas dari seberapa besar dan luas urusan yang diberikan kepada sekolah (Gamage & Zajda :2009:5; Zajda & Gamage, 2009: xvii).

2. Peran Komite Sekolah Dalam MBS

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan (Kriswantono dan Muhyadi, 2013:70). MBS sebagai model penyelenggaraan pelayanan pendidikan menuntut adanya kemitraan dan kerjasama yang baik antara manajemen sekolah dengan pihak mitra, yaitu Komite sekolah dan masyarakat.

Komite sekolah sebagai mitra dalam MBS, memiliki peran yang penting dalam proses manajemen, karena Komite merupakan mitra strategis dalam pencapaian tujuan sekolah. Oleh karena itu MBS melalui proses manajemennya harus melibatkan mitranya dalam kerja. Manajemen sekolah dimaksudkan sebagai proses pendayagunaan sumber daya, baik manusia dan sumber daya lainnya dengan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai efisien dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, keterlibatan komite dalam proses manajemen meliputi keterlibatan dalam tahapan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi kegiatan perencanaan program dan kegiatan, penatalaksanaan kegiatan (*organizing*) penggerakkan program dan kegiatan (*actuating*); dan evaluasi kegiatan.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa keterlibatan komite sekolah dalam proses manajemen sekolah bervariasi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, tergantung dari konteks kegiatan; kondisi komite sekolah

dan keadaan manajemen sekolah. Oleh karena itu pelibatan komite sekolah dalam proses manajemen tergantung dari pemahaman dan jalinan hubungan yang terjadi diantara ke dua belah pihak Pihak sekolah cenderung melibatkan pihak komite sekolah dalam setiap aktivitas apabila kepala sekolah merasa kurang percaya diri terhadap kegiatan yang disusun, sementara komite sekolah memiliki kemampuan untuk menekan terhadap kepala sekolah. dalam kondisi yang demikian, biasanya komite sekolah cenderung untuk sering dilibatkan dalam setiap penyusunan program dan kegiatan. Hal ini tidak lepas dengan kedudukan Komite sekolah yang menurut sifatnya adalah badan mandiri yang tidak mempunyai hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah daerah. (Kriswantono dan Muhyadi, 2013:72).

Berdasarkan kajian tersebut, maka secara umum keterlibatan komite dalam proses manajemen sekolah dapat dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan, *pertama*, keterlibatan komite hanya dalam proses penyusunan rencana kegiatan secara penuh. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu anggota komite sekolah bahwa:

Kedua, Keterlibatan komite sekolah dalam kegiatan tertentu dari kegiatan sekolah, keterlibatan komite sekolah cenderung hanya sebagai legalitas, dimana sekolah tidak melibatkan komite sekolah dalam penyusunan rencana kegiatan, tetapi kemudian pihak sekolah melaporkan dan meminta legalisasi atas rencana kegiatan yang telah disusun oleh komite sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan

Dalam proses tata kelola, komite sekolah memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas, karena komite sekolah juga memiliki peran sebagai pengawas untuk menjalankan fungsi kontrol pada satuan pendidikan. Fungsi kontrol merupakan manifestasi dari peran masyarakat dalam ikut serta mengawal program-program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fungsi ini terkait dengan kedudukan sekolah sebagai lembaga publik yang melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan. Sebagai lembaga publik, hampir seluruh aktifitas sekolah menggunakan dan memanfaatkan anggaran publik untuk operasionalisasi pelayanan pendidikan, yaitu mulai dari anggaran untuk pembayaran gaji para guru dan karyawan, anggaran untuk kegiatan operasional pendidikan, dan anggaran untuk pembiayaan sarana dan

prasarana pendidikan dan anggaran untuk kegiatan operasional lainnya yang masih terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan.

Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Masih banyak komite sekolah yang belum mampu mengontrol apa yang dilakukan oleh sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena masih ada komite sekolah yang kedudukannya lemah dan kurang berdaya ketika berhadapan dengan manajemen sekolah. Hal ini disebabkan beberapa hal: (i). Banyak komite sekolah pengurusnya kurang memiliki kepedulian yang memadai. Kondisi ini terjadi pada satuan pendidikan yang berada di daerah pedesaan, dan sebagian wali murid memiliki status sosial ekonomi yang kurang, sehingga segala sesuatu yang terjadi di sekolah diserahkan kepada sekolah. Komite sekolah cenderung menurut apa yang dikatakan dan diminta oleh pihak manajemen sekolah. (ii) Keterbatasan kompetensi dari komite sekolah disebabkan keterbatasan sumber daya yang ada disekitar Sekolah untuk duduk dalam kepengurusan komite sekolah. Kondisi yang demikian umumnya terjadi pada daerah dan wilayah pedesaan. Kondisi yang demikian sangat berbeda dengan kondisi komite sekolah yang berada di wilayah perkotaan.

Kedua, pengelolaan anggaran sekolah yang berasal dari BOS dan dana bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, model pertanggung jawaban penggunaan dan pengelolaan anggaran pendidikan lebih bersifat vertikal, yaitu pertanggung jawaban anggaran hanya lebih berat kepada institusi yang ada di atasnya, yaitu pemerintah melalui dinas pendidikan di daerah. Komite sekolah tidak dilibatkan dalam proses tersebut, dan untuk hal-hal tertentu, Komite sekolah hanya berfungsi sebagai lembaga legalisasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi dimana walaupun sekolah diberikan otonomi, tetapi kurang memiliki ruang yang banyak untuk berkreasi. Kegiatan dan program yang terkait dengan penggunaan telah diatur secara rigid. Hal ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh sekolah. Walaupun sistem anggaran yang diberikan kepada sekolah berupa *block grant*, tetapi karena anggaran untuk pembiayaan sekolah yang terbatas, maka sekolah cenderung tidak dapat melakukan aktivitas secara leluasa, sesuai dengan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, MBS sebagai model tata kelola penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mencapai sasaran pendidikan, yaitu pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, MBS sebagai sistem dan model yang baru dalam sistem manajemen dan tata kelola pendidikan, masih memerlukan adanya penguatan kapasitas terhadap para pelaksana, khususnya kepala sekolah dan stakeholder yang terlibat dalam tata kelola tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi yang telah membiayai penelitian ini melalui skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, dan juga LPPM yang telah ikut serta dalam tata kelola penelitian ini.

DAFTAR PUSATAKA

- Faozanudin, Muslih, 2013, *Pengaruh Kapasitas Organisasi Pemerinta Daerah terhadap efektifitas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasaranan Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumnas*, Disertasi Bandung: Universitas Padjajaran
- Haryanto, Indra HSL, 2014, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penerapan, *Jurnal Akutabilitas Mana jemen Pendidikan* Volume 2, Nomor 2, 2014
- Kriswantono, Mawan dan Muhyadi , 2013, Implementasi Peran Komite Sekolah Di Sd Negeri Sumberporong 03 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, *Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, 2013
- Marshall, Catherine & Gretchen B. Rosman. 1989. *Desinging Qualitative Research*, London: Sage Publication
- Miles, Matthew B. & A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nurkholis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Grasindo).
- Rado, Peter
- Zainuddin, 2008, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soewartoyo, et.all, 2003: *Persepsi MAsyarakat Terhadap Desentralisasi Pendidikan*, Jakarta Sinar Harapan.
- Zajda, Joseph and David Gemage, 2009, ,Decentralisation and School-Based Management and Quality; in Joseph Zajda and David T. Gamage, 2009, *Decentralisation, School-Based Management, and Quality*, London: Springer
- Kompas.com*. Jumat (23/7/2010),
- Kompas.com*. Jumat (23/7/2010).”